

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PERIODE JANUARI – DESEMBER 2023

PT. BPR PRIMA NADI



Kantor Pusat :

Jl. A. A. Gede Ngurah No.
95 Cakranegara, Telp.
(0370) 637269, 624557
www.bprprimanadi.co.id



BAB I PENJELASAN UMUM

Seiring dengan meningkatnya persaingan serta risiko bisnis dan operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan PT. BPR Prima Nadi dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practice).

PT. BPR Prima Nadi menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan untuk dapat menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Tujuan penerapan Tata Kelola yang baik bagi PT. BPR Prima Nadi antara lain untuk:

1. Mendukung visi PT. BPR Prima Nadi, yaitu "Menjadi BPR yang SEHAT, HANDAL, TERPERCAYA dan UTAMA";
2. Mendukung misi PT. BPR Prima Nadi;
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham;
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang; dan
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat, nasabah dan stakeholder.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Albertus Ary Utama
	Jabatan	: Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasional dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, yaitu:		
1. Bersama Direktur Utama dan Direktur lainnya merealisasikan rencana strategis BPR;		
2. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;		
3. Membuat Daftar Pemegang Saham berikut daftar sahamnya, risalah RUPS dan risalah Rapat Direksi, serta mendokumentasikannya;		
4. Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu memastikan BPR telah memenuhi terlaksananya seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan, antara lain (i) menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan, (ii) menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat kepada Otoritas, (iii) mencegah Direksi BPR untuk menetapkan kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau perundang-undangan, (iv) menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus mengenai kebijakan dan/ atau keputusan Direksi yang menurut pendapatnya menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau perundang-undangan lainnya;		
5. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris;		
6. Mengarahkan, membimbing, mensupervisi dan mendorong Pejabat Eksekutif dan seluruh Staf dibawahnya untuk memberikan kinerja terbaik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;		
7. Melakukan penilaian kinerja terhadap Pejabat Eksekutif dibawahnya;		
8. Memastikan kecukupan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur internal BPR;		
9. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama; dan		
10. Melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan kerja BPR terkait keamanan dan kenyamanan, baik secara langsung ataupun tidak langsung;		
2.	Nama	: I Gusti Ketut Sri Putranta
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kredit, yaitu:		
1. Memberikan arahan, bimbingan dan supervisi kepada Pejabat Eksekutif dan seluruh Staf dibawahnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing mulai dari kegiatan proses kredit, pembinaan kredit dan penanganan kredit bermasalah;		
2. Menyelenggarakan rapat komite kredit;		
3. Memastikan dan mengevaluasi dengan seksama terhadap setiap portofolio kredit		



PT. BPR PRIMA NADI

Jl. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram

Telepon: 0370-637269

Website: www.bprprimanadi.co.id. Email: manrisk.bprprimanadi@gmail.com

- sesuai dengan pedoman, sistem dan prosedur yang berlaku sehingga mampu mengamankan perusahaan dari timbulnya risiko kredit;
4. Melakukan koordinasi dan mengarahkan unit kerja terkait dalam hal penanganan kredit bermasalah;
 5. Membuat perencanaan dan melakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit;
 6. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama;
 7. Mengusahakan agar setiap penyaluran kredit menghasilkan pendapatan yang optimal;
 8. Mengarahkan dan mendorong Pejabat Eksekutif dan seluruh Staf dibawahnya untuk memberikan kinerja yang terbaik sesuai rencana kerja yang ditetapkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 9. Melakukan evaluasi dan kajian terkait pengembangan unit kerja dibawahnya agar tercipta iklim dan tim kerja yang baik sehingga hasil kerja efektif dan optimal;
 10. Melakukan penilaian kinerja kepada Pejabat Eksekutif dibawahnya;
 11. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Telah mencari referensi tentang digitalisasi yang sesuai dengan kebutuhan BPR. Yang saat ini sudah berjalan yaitu Virtual Account dan sistem absensi online menggunakan Talenta.
2. Telah melakukan evaluasi terhadap market yang ada serta mencari pasar baru dan mapping area.
3. Telah dibuatkan rincian kredit bermasalah disertai dengan nilai jaminan dan progresnya, kemudian dibuatkan usulan solusi untuk dapat menurunkan NPL.
4. Melakukan perawatan terhadap AYDA dengan baik dan mencarikan pembeli agar dapat disegerakan untuk terjual.
5. Mencari dan menyebarkan pemberitahuan untuk lowongan pekerjaan di media sosial untuk mengisi struktur organisasi yang kosong. Dan untuk peningkatan kompetensi, telah disusun rencana pelatihan kepada karyawan.
6. Akan mengembangkan cara analisa kredit dengan sistem scoring dan akan membuat standar penilaian baik untuk agunan maupun tata caranya.
7. Telah melakukan diskusi serta kajian terhadap usulan untuk skim kredit yang baru yang disesuaikan dengan prioritas arah kebijakan kredit.
8. Inventarisasi terhadap ketentuan internal, baik berupa kebijakan, SOP maupun SK dan Memo Direksi dilakukan dan disertai dengan time line proses pengkiniannya.
9. Telah dilakukan kajian risiko terhadap penempatan dana antar bank untuk memperoleh hasil yang optimal.
10. Telah dilakukan kajian untuk promosi/ branding dengan membuat program tabungan berhadiah.
11. Melakukan evaluasi terhadap suku bunga kredit.
12. Melakukan kajian dan evaluasi terkait dengan sektor mana yang masih punya peluang untuk dikembangkan dan sektor mana yang harus dihindari kedepannya.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Direktur Utama atas nama Oenit Ingmadia telah mengundurkan diri dan disetujui pengunduran diri Efektif pertanggal 20 Desember 2023. Saat ini masih belum ada pengganti Direktur Utama.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Ronny Abdikesuma
	Jabatan	:	Komisaris



PT. BPR PRIMA NADI

JL. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram

Telepon: 0370-637269

Website: www.bprprimanadi.co.id. Email: manrisk.bprprimanadi@gmail.com

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh kegiatan usaha BPR;
3. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
4. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
6. Memberikan pertimbangan atas usulan Direktur Utama BPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern;
7. Dalam penerapan Manajemen Risiko, antara lain menyetujui, memastikan dan mengevaluasi kebijakan serta pertanggungjawaban pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, kecuali (i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (ii) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR, (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (iv) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2. Nama : Ida Komang Suwignya

Jabatan : Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh kegiatan usaha BPR;
3. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
4. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
6. Memberikan pertimbangan atas usulan Direktur Utama BPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern;
7. Dalam penerapan Manajemen Risiko, antara lain menyetujui, memastikan dan mengevaluasi kebijakan serta pertanggungjawaban pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, kecuali (i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (ii) telah melakukan



pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR, (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (iv) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

3. Nama : Thony Wijaya

Jabatan : Komisaris Utama

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR;
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada seluruh kegiatan usaha BPR;
3. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
4. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
6. Memberikan pertimbangan atas usulan Direktur Utama BPR dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Intern;
7. Dalam penerapan Manajemen Risiko, antara lain menyetujui, memastikan dan mengevaluasi kebijakan serta pertanggungjawaban pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi serta mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, kecuali (i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, (ii) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BPR, (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan (iv) telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Rekomendasi Kepada Direksi :

1. Lakukan digitalisasi dalam menghadapi persaingan kedepannya. Referensi tentang digitalisasi yang sesuai dengan kebutuhan BPR agar segera di jajaki dengan baik.
2. Penyaluran kredit harus dilihat dan dievaluasi dengan baik market yang ada, sasaran yang akan dituju dan market intern.
3. Lakukan mapping area disekitar lokasi kantor, segmen pasar mana yang bisa kita garap agar dilihat dan dievaluasi dengan baik.
4. Membuat rincian kredit bermasalah disertai dengan nilai jaminan serta progresnya dan usulan solusi penurunan NPL serta penggunaan lawyer untuk membantu penanganan kredit bermasalah.
5. AYDA yang ada agar dirawat dengan baik dan segera mungkin dilakukan penjualan.
6. Segera mengisi struktur organisasi yang kosong serta menyusun rencana pelatihan kepada karyawan yang meminta masukan dari para Pejabat Eksekutif.
7. Secara bertahap dapat menerapkan analisa kredit dengan sistem scoring dimana tentunya harus dibangun terlebih dahulu kesepakatan terkait dengan standar penilaian yang akan digunakan.
8. Usulan terhadap skim kredit yang baru agar dilakukan kajian yang mendalam terlebih



- dahulu serta menetapkan prioritas mana yang dapat dilaksanakan.
9. Agar dilakukan inventarisasi terhadap ketentuan internal, baik berupa kebijakan, SOP maupun SK dan Memo Direksi yang ada serta dibuatkan time line proses pengkiniannya.
 10. Lakukan kajian risiko terhadap penempatan dana antar bank untuk memperoleh hasil yang optimal.
 11. Perlu dikaji kembali dalam rangka melakukan promosi/branding untuk membuat program tabungan berhadiah.
 12. Agar dilihat dan dievaluasi suku bunga kredit dari pesaing yang ada.
 13. Memperhatikan sektor mana yang masih punya peluang untuk dikembangkan dan sektor mana yang harus dihindari.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi	



c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Albertus Ary Utama	Rp0	0%
2.	I Gusti Ketut Sri Putranta	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak ada yang memiliki saham di BPR Prima Nadi.			



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Albertus Ary Utama	-	-	0%
2.	I Gusti Ketut Sri Putranta	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak ada yang memiliki saham di perusahaan lain.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Albertus Ary Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Gusti Ketut Sri Putranta	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi PT. BPR Prima Nadi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Albertus Ary Utama	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I Gusti Ketut Sri Putranta	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi PT. BPR Prima Nadi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi Lain, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.				



D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronny Abdikesuma	Rp900.000.000	10%
2.	Ida Komang Suwignya	Rp0	0%
3.	Thony Wijaya	Rp3.600.000.000	40%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dari 3 (tiga) orang anggota Komisaris, terdapat 2 (dua) orang anggota komisaris yang merupakan Pemegang Saham PT. BPR Prima Nadi yaitu Tn. Thony Wijaya sebesar 40% dan Tn. Ronny Abdikesuma sebesar 10%.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Ronny Abdikesuma	601062	PT. BPR Prima Dewata	10%
2.	Ronny Abdikesuma	602706	PT BPR Prima Sejahtera	10%
3.	Thony Wijaya	602706	PT BPR Prima Sejahtera	45%
4.	Thony Wijaya	601062	PT. BPR Prima Dewata	45%

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dari 3 (tiga) orang anggota Komisaris terdapat 2 (dua) orang anggota Komisaris PT. BPR Prima Nadi yaitu Tn. Thony Wijaya dan Tn. Ronny Abdikesuma memiliki saham pada BPR lain yaitu pada PT. BPR Prima Dewata dan PT. BPR Prima Sejahtera dengan komposisi kepemilikan sebagaimana data tersebut diatas.

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Ronny Abdikesuma	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ida Komang Suwignya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada



3.	Thony Wijaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak terdapat hubungan keuangan antara Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi dengan anggota Dewan Komisaris Lain, anggota Direksi dan Pemegang Saham.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Ronny Abdikesuma	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ida Komang Suwignya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Thony Wijaya	Tidak ada	Tidak ada	Yasin Wijaya - Kakak Kandung, Linda Trisnawati - Ibu Kandung
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Sebagaimana data tersebut diatas dapat disampaikan bahwa: 1. Tidak terdapat hubungan keluarga antara Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris yang Lain. 2. Tidak terdapat hubungan keluarga antara Dewan Komisaris dengan anggota Direksi. 3. Dari 3 (tiga) orang anggota Komisaris, terdapat 1 (satu) orang anggota komisaris yaitu Tn. Thony Wijaya memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham PT. BPR Prima Nadi.				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp587.911.248	3	Rp479.278.512
2.	Tunjangan	0	Rp0	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp587.911.248		Rp479.278.512
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket/ kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi ditetapkan oleh RUPS. Gaji yang dimaksud diatas masih terdapat gaji dari Direktur Utama yang dibayarkan terakhir pada Bulan Desember 2023.					



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (3)	Mobil (2)
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi dalam bentuk transportasi yaitu mobil.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.03 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.56 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.08 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.47 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.25 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji yang diperbandingkan dalam ratio tersebut di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai. Gaji yang diterima oleh Direktur Utama masih termasuk dalam rasio ini dikarenakan gaji tersebut dibayarkan terakhir pada bulan Desember 2023. dan yang dimaksud dengan pegawai adalah seluruh pegawai tetap PT. BPR Prima Nadi.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	25 Januari 2023	3	Evaluasi RBB Bulan Desember 2022
2.	14 April 2023	3	Kebijakan dan Isu-Isu Strategis



3.	24 Juli 2023	3	Evaluasi RBB Semester 1 Tahun 2023
4.	06 Oktober 2023	3	Isu-isu strategis.
5.	15 November 2023	3	Rencana Bisnis BPR tahun 2024
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dalam tahun 2023 Dewan Komisaris melaksanakan Rapat sebanyak 5 (lima) kali. Dari 5 (lima) kali pelaksanaan rapat, dihadiri secara fisik oleh 3 (tiga) orang anggota komisaris.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Ronny Abdikesuma	5	0	100%
2.	Ida Komang Suwignya	5	0	100%
3.	Thony Wijaya	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Pada tahun 2023, dari 5 (kali) kali pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, dihadiri oleh semua anggota dewan Komisaris.				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak terdapat Fraud tahun 2023								



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	10	13
Total	10	13
Penjelasan Lebih Lanjut		
Permasalahan hukum Perdata yang dihadapi Bank terdiri dari: 1. Proses Kasasi di tingkat Mahkamah Agung; 2. Banding dari Debitur atas Putusan Tingkat Pertama; 3. Gugatan dari Debitur yang saat ini dalam tahap persidangan; 4. Proses penyidikan terhadap Debitur; 5. Proses Anmaning oleh Pengadilan;		
Proses hukum Pidana yang dihadapi Bank seluruhnya dalam tahap proses penyidikan terhadap debitur yang melakukan perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Pada tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	12 Januari 2023	Sosial	Partisipasi Bantuan Banjir	Masyarakat	Rp1.000.000
2.	31 Januari 2023	Sosial	Pertisipasi Pembuatan Ogoh-Ogoh	Masyarakat	Rp500.000
3.	11 April 2023	Sosial	Pembelian 100 Kg Beras Untuk Masjid Perigi	Masyarakat	Rp1.150.000
4.	13 April 2023	Sosial	Pembelian Beras	Masyarakat	Rp990.000



PT. BPR PRIMA NADI

JL. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram

Telepon: 0370-637269

Website: www.bprprimanadi.co.id. Email: manrisk.bprprimanadi@gmail.com

			Untuk Sumbangan Idul Fitri		
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Sebagaimana daftar tersebut diatas, selama tahun 2023, PT. BPR Prima Nadi 4 kali memberikan sumbangan untuk kegiatan Sosial.					



BAB III

HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR PRIMA NADI
Alamat	: JL. A.A. Gde Ngurah No. 95 Cakranegara Mataram
Nomor Telepon	: 0370-637269
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp20.424.317.603
Total Aset	: Rp208.427.534.395

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR PRIMA NADI Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.8 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.74	0.348
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.67	0.251
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50	0.150
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.47	0.247
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.85	0.185
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.10	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.02	0.202
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.20	0.090
10	Rencana Bisnis BPR	1.90	0.143
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.90	0.143
Nilai Komposit			1.800
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.74)

Jumlah anggota Direksi PT. BPR Prima Nadi sebanyak 2 (dua) orang dikarenakan Direktur Utama mengundurkan diri efektif pertanggal 20 Desember 2023. Masing-masing Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman dan tata tertib Direksi yang telah ditetapkan. 1 (satu) anggota berfungsi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.67)

Dewan Komisaris PT. BPR Prima Nadi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Pada periode tahun 2023, jumlah modal inti PT. BPR Prima Nadi masih dibawah Rp.50 Milyar sehingga belum membentuk Komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

Selama periode tahun 2023, PT. BPR Prima Nadi tidak pernah mengalami benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.47)

PT. BPR Prima Nadi terus berusaha menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, namun selama tahun 2023, hasil yang dicapai masih belum maksimal karena ada beberapa keterlambatan pelaporan yang terjadi.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.85)

PT. BPR Prima Nadi telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1,1)

PT. BPR Prima Nadi telah menerapkan fungsi audit ekstern sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.02)

Sehubungan tahun 2023, modal inti PT. BPR Prima Nadi masih dibawah Rp. 50 Milyar, maka pada semester II tahun 2023 bank telah menerapkan 4 (empat) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.2)

Selama periode tahun 2023, PT. BPR Prima Nadi telah melaksanakan ketentuan BMPK secara



baik dan tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan BMPK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.9)

Penyusunan Rencana Bisnis PT. BPR Prima Nadi untuk tahun 2023 sebagian besar telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.9)

Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan PT. BPR Prima Nadi telah dilaksanakan dengan baik namun untuk kedepan masih perlu ditingkatkan.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 78 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka setelah dilakukan penilaian sendiri (Self Assesment) terhadap Penerapan Tata Kelola tahun 2023 diperoleh Nilai Komposit yaitu 1,8 (Satu koma delapan) atau berpredikat Baik.

Mataram, 16 Januari 2024

PT. BPR PRIMA NADI


Thony Wijaya
Komisaris Utama



Albertus Ary Utama
Direktur